



Analisis Pengembangan Wisata Halal di Pantai Siring Laut dalam Perspektif *Global Muslim Friendly Tourism*

Imroatul Azizah^{1*}, Ahmad Yunadi²

¹⁻² Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: 222200455@almaata.ac.id¹, ahmadyunadi@almaata.ac.id²

*Penulis Korespondensi: 222200455@almaata.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the development potential of halal tourism at Siring Laut Beach, Kotabaru Regency, based on the Global Muslim Friendly Tourism (GMFT) perspective. The research employs a qualitative method with a descriptive approach to provide a comprehensive understanding of the destination's readiness to meet halal tourism standards. Data were collected through observations, interviews with relevant stakeholders, documentation, and literature reviews. The analysis was conducted using the 4A tourism framework (Attraction, Accessibility, Amenities, and Ancillary) alongside the ACES framework (Access, Communication, Environment, and Services). The findings indicate that Siring Laut Beach possesses significant potential as a halal tourism destination due to its attractive coastal scenery, family-friendly atmosphere, and supportive accessibility. However, several aspects require further improvement, including the provision of halal-certified food and beverages, adequate worship facilities, halal tourism branding and promotion, service quality enhancement, and stronger institutional support. The study concludes that optimizing these elements is essential for enabling Siring Laut Beach to fulfill Global Muslim Friendly Tourism standards and strengthen its competitiveness as a sustainable halal tourism destination.*

Keywords: GMFT; GMTI; Halal Tourism; Siring Laut; Tourism Development.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan wisata halal di Pantai Siring Laut, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan perspektif Global Muslim Friendly Tourism (GMFT). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam pengembangan destinasi wisata halal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan konsep 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, dan Ancillary) serta kerangka ACES (Access, Communication, Environment, dan Services). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Siring Laut memiliki potensi yang besar sebagai destinasi wisata halal karena didukung oleh daya tarik alam, aksesibilitas yang memadai, serta lingkungan yang nyaman bagi wisatawan. Namun, masih diperlukan berbagai upaya pengembangan, seperti peningkatan kualitas layanan, penyediaan fasilitas yang ramah Muslim, sertifikasi halal bagi produk dan layanan, penguatan promosi wisata halal, serta pengembangan kelembagaan pengelola destinasi. Dengan optimalisasi aspek-aspek tersebut, Pantai Siring Laut berpeluang memenuhi standar Global Muslim Friendly Tourism dan meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi wisata halal yang berkelanjutan.

Kata Kunci: GMFT; GMTI; Pariwisata Halal; Pengembangan Wisata; Siring Laut.

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kota Baru di Provinsi Kalimantan Selatan punya potensi besar untuk wisata pantai, dan Pantai Siring Laut jadi salah satu daya tarik utamanya. Tetapi, pengembangan wisata di sini masih kurang, dengan infrastruktur yang belum memadai seperti jalan akses, tempat menginap, dan layanan yang belum sesuai standar halal. Menurut data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Baru tahun 2023, pengunjung ke pantai ini kebanyakan masih dari lokal, dengan jumlah sekitar 50.000 orang per tahun, yang masih jauh dari potensi maksimalnya (Nasrulloh, Adiba, & Efendi, 2023).

Pantai Siring Laut, yang berada di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, adalah salah satu area publik di tepi laut yang punya posisi penting karena letaknya di tengah kota dan sudah terdaftar sebagai objek wisata dalam Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (SISPARNAS). Berdasarkan datanya, pantai ini mulai aktif sejak tahun 2019 dan sudah dilengkapi dengan fasilitas pokok seperti tempat ibadah dan toilet umum, termasuk yang khusus untuk penyandang disabilitas atau lansia. Hal ini menandakan bahwa Siring Laut tidak cuma jadi tempat rekreasi dadakan lagi, tapi sudah dianggap sebagai destinasi resmi dalam dunia pariwisata yang terorganisir, sehingga kesempatan untuk mengembangkannya terutama dengan memperkuat ide wisata halal terus terbuka dan dipelajari lebih dalam secara akademis (Pramana & Zamaya, 2021).

Di Pantai Siring Laut, membangun wisata halal bukan cuma soal tambah simbol atau stiker, tapi harus dilihat sebagai upaya total untuk tingkatkan mutu layanan destinasi secara keseluruhan. Data menunjukkan bahwa pantai ini sudah punya tempat ibadah dan fasilitas makan-minum, yang jadi langkah awal yang bagus. Tapi konsep "wisata halal" dan "ramah Muslim" butuh komitmen lebih dalam: pastikan makanan benar-benar halal bukan cuma dugaan, kebersihan yang sesuai standar, informasi yang transparan, dan pengaturan area yang cocok untuk keluarga. Jika diperkuat sistem pengelolaan dan aturan layanan, tempat ini bisa-bisa ramai dari segi angka tapi melemah dari kualitas dan kepercayaan konsumen khususnya untuk wisatawan muslim yang peduli banget sama jaminan layanan yang sesuai nilai-nilai mereka (Fradesa, 2022).

Secara konsep, *Muslim Friendly Tourism* itu berkembang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tapi tetap terbuka buat wisatawan non-Muslim juga. Di tingkat dunia, salah satu acuan utama yang sering dipakai adalah Global Muslim Travel Index (GMTI), yang menilai berbagai destinasi berdasarkan kerangka ACES yaitu *Access, Communication, Environment, dan Services* dan ini meliputi ratusan tempat wisata di seluruh dunia. Kerangka global seperti ini sangat berguna karena memberikan semacam "bahasa baku" untuk mengukur seberapa siap suatu destinasi, serta membimbing strategi perbaikan. Dengan begitu, pengembangan wisata halal nggak cuma bergantung pada asumsi pribadi, tapi berdasarkan indikator yang bisa diterapkan jadi program konkret di lapangan (Rachmiation, Setiawan, Yuningsih, & Suja'i, 2023). Nilai al-quran dalam menasihati umat islam untuk mencari keberkahan dunia dan akhirat juga selaras dengan semangat pengembangan wisata halal (Al qashash ayat 77).

لَا يَكُ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ فَيِّمًا إِنَّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَجْرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَإِيتِغِ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat ini menegaskan bahwa dengan melindungi lingkungan dan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat, semua usaha ekonomi, termasuk pariwisata, harus terus mempertimbangkan kelarasan antara pahala kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Prinsip-prinsip ini, hanya menekankan tidak hanya keuntungan finansial tetapi juga perilaku moral, keberlanjutan, dan masyarakat makmur, membentuk landasan intelektual bagi pertumbuhan pariwisata halal (Yunadi, Ifsantin Maula, Al Adhawiyah, & Nikmatul Ula, 2024).

Di tingkat nasional, pengembangan pariwisata yang ramah muslim makin terorganisir berkat adanya alat penilaian. Kementerian Pariwisata mengumumkan bahwa Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 mengevaluasi 15 provinsi utama, termasuk Kalimantan Selatan, dengan menggunakan kerangka ACES yaitu Akses, Komunikasi, Lingkungan, dan Layanan yang sejalan dengan Global Muslim Travel Index (GMTI).

Beberapa penelitian sebelumnya sudah memberikan dasar yang kuat, tapi juga mengungkap kekurangan yang harus diatasi. Misalnya, penelitian Adinugraha, Al-Kasyaf, dan Nasaruddin (2025) menemukan hambatan seperti kurangnya fasilitas ibadah, sertifikasi halal yang belum maksimal untuk makanan dan tempat menginap, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola destinasi. Sementara itu, studi kasus di Lombok menekankan bahwa wisata halal saling terkait dengan dinamika sosial dan pembentukan identitas, sehingga kebijakan serta praktik wisata halal harus dipahami berdasarkan konteks setempat (Fahira, Qodhari, & Azhar, 2025). Dari kajian terdahulu, sejumlah literatur menunjukkan adanya pijakan penting, tetapi juga memperlihatkan kesenjangan yang membuat penelitian ini relevan.

Dari tinjauan literatur 2023 yang menyatakan konsep halal tourism “masih kurang presisi” mengindikasikan ruang penelitian yang penting: perlunya studi yang tidak hanya membahas konsep, melainkan mengurai bagaimana konsep dipahami dan dinegosiasikan oleh pelaku di lapangan. Dengan demikian, celah penelitian (research gap) pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) minimnya kajian yang memotret implementasi *Muslim Friendly Tourism* (MFT) pada destinasi tumbuh di wilayah seperti Kotabaru; (2) keterbatasan kajian yang menghubungkan standar global *Muslim Friendly Tourism* (MFT) dengan realitas lokal pengelolaan ruang publik wisata; dan (3) kurangnya pemahaman mendalam tentang

persepsi/ pengalaman wisatawan dan pelaku lokal terhadap kesiapan destinasi, terutama ketika data fasilitas menunjukkan ketidakseimbangan tertentu (misalnya pusat informasi “0” tetapi tempat ibadah “ada”).

Berdasarkan fenomena, urgensi, serta kesenjangan kajian tersebut, penelitian kualitatif ini menjadi penting karena berpotensi menghasilkan pemahaman yang lebih “hidup” dan kontekstual: bukan hanya apa yang ada di destinasi, tetapi bagaimana layanan dijalankan, bagaimana aktor menafsirkan “*muslim-friendly*”, mengapa standar tertentu belum terpenuhi, dan strategi apa yang realistis untuk menjembatani standar global *Muslim Friendly Tourism* (MFT) dengan kebutuhan lokal.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pariwisata (Tourism Theory-Dasar Umum)

Teori pariwisata dasar umum sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan fenomena pariwisata sebagai aktivitas manusia yang melibatkan perjalanan, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan. Salah satu teori dasar adalah Teori Sistem Pariwisata yang dikembangkan oleh Neil Leiper (1979), yang melihat pariwisata sebagai sistem interdependen. Teori ini menekankan bahwa pariwisata bukan sekadar aktivitas isolasi, melainkan jaringan yang melibatkan komponen-komponen utama seperti wisatawan, destinasi, dan industri pendukung.

Referensi pendukung menunjukkan bahwa teori pariwisata dasar telah diperluas untuk mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti keberlanjutan dan digitalisasi. Misalnya, dalam artikel oleh (Pencarelli, 2020), teori sistem diperbarui untuk era digital: “*The digital revolution in the travel and tourism industry*”. Selain itu, studi oleh (Abdiska & Kamarni, 2024) menyoroti integrasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam sistem pariwisata: “*The Influence Of Muslim Friendly Tourism On The Satisfaction Of Tourists Visiting The Tourist Attraction Of Air Manis Beach In Padang City-Debi Abdiska et.al The Influence Of Muslim Friendly Tourism On The Satisfaction Of Tourists Visiting The Tourist Attraction Of Air Manis Beach In Padang City*”.

Teori Sistem Pariwisata (Leiper)

Teori Sistem Pariwisata yang dikembangkan oleh Neil Leiper (1979) menggambarkan pariwisata sebagai sistem yang terdiri dari empat komponen utama: wisatawan (*tourist*), destinasi (*destination*), wilayah transit (*transit region*), dan industri pariwisata (*tourism industry*). Sistem ini beroperasi dalam lingkungan eksternal yang memengaruhi aliran informasi, uang, dan orang. Wisatawan adalah inti sistem, yang memulai perjalanan berdasarkan motivasi dan kebutuhan. Destinasi adalah tempat tujuan yang menawarkan atraksi

dan pengalaman. Wilayah transit mencakup area perjalanan yang menghubungkan asal dengan destinasi. Industri pariwisata meliputi operator seperti hotel, restoran, dan agen perjalanan yang mendukung aktivitas wisata.

Menurut Leiper menekankan bahwa keseimbangan antara komponen-komponen ini penting untuk keberlanjutan pariwisata. Verkerk (2022) memperbarui teori ini dengan memasukkan peran digital: *"Digital platforms have become integral to the tourism system, facilitating interactions between tourists and destinations"*. Selain itu, studi oleh McKercher dan Wong (2021) mengintegrasikan teori Leiper dengan konsep keberlanjutan: *"Leiper's model can be extended to include environmental and social sustainability, ensuring that tourism systems do not degrade destinations"*

Konsep 4A Pariwisata

Konsep 4A dalam pariwisata merujuk pada elemen-elemen kunci yang diperlukan untuk pengembangan destinasi wisata yang efektif. Konsep ini awalnya dikembangkan sebagai 3A (*Attraction, Accessibility, Amenities*), kemudian diperluas menjadi 4A dengan penambahan *Ancillary Attraction Accessibility* (kelembagaan atau dukungan). *Attraction* (daya tarik) adalah elemen utama yang menarik wisatawan, seperti keindahan alam, budaya, atau atraksi spesifik. *Accessibility* (aksesibilitas) mencakup kemudahan transportasi dan infrastruktur untuk mencapai destinasi. *Amenities* (fasilitas) meliputi akomodasi, restoran, dan layanan pendukung lainnya. *Ancillary* (kelembagaan /dukungan) merujuk pada institusi seperti pemerintah, asosiasi pariwisata, dan regulasi yang mendukung pengembangan.

Verkerk (2022) membahas adaptasi konsep 4A untuk pariwisata berkelanjutan: *"The 4A framework must incorporate resilience to crises, with ancillary elements playing a key role in policy-making"*. Gössling dan Scott (2025) menekankan peran *accessibility* dalam konteks perubahan iklim: *"Improved accessibility is crucial for coastal destinations, but must be balanced with environmental protection"*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai bahan tertulis yang relevan seperti dokumen resmi pemerintah seperti Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), laporan Dinas Pariwisata, dan peraturan daerah terkait pengembangan pariwisata halal. Penelitian dilakukan di Pantai siring laut pada bulan April 2026. Tiga teknik utama yang digunakan untuk

mengumpulkan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), teknik partisipatif, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan model analisis Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu kondensasi data (*data condensation*), *data display* (penyajian data), serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Daya Tarik (Attraction) di Pantai Siring Laut

Daya tarik (*Attraction*) merupakan elemen esensial yang menjadi alasan utama wisatawan berkunjung ke suatu destinasi (Weaver & Lawton, 2014). Berdasarkan hasil pengolahan data, daya tarik Pantai Siring Laut sangat identik dan direpresentasikan kuat oleh kode "Kenyamanan Wisatawan". Temuan di lapangan menunjukkan bahwa destinasi ini tidak sekadar menawarkan pesona alam pesisir, tetapi juga berhasil menghadirkan suasana yang kondusif, lingkungan yang terawat, dan tingkat keamanan yang baik sehingga sangat mendukung kegiatan rekreasi keluarga.

Kenyamanan dan rasa aman yang menjadi daya tarik utama ini terekam dengan sangat jelas dari respon positif para informan. Wisatawan merasa bahwa kondisi lingkungan yang relatif bersih dan aman memberikan pengalaman berwisata yang menyenangkan. Pantai Siring Laut berhasil membangun persepsi daya tarik yang positif melalui penciptaan rasa aman dan nyaman, yang mana hal ini merupakan salah satu prasyarat emosional paling penting bagi wisatawan dalam konsep wisata ramah muslim.

Aksesibilitas (Accessibility) Menuju Kawasan Wisata

Aksesibilitas (*Accessibility*) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem kepariwisataan yang menentukan seberapa mudah dan efisien wisatawan dapat mencapai suatu destinasi (Weaver & Lawton, 2014). Dalam perspektif *Muslim Friendly Tourism* (MFT), aksesibilitas yang baik tidak hanya diukur dari ketersediaan jalan raya semata, melainkan juga menyangkut aspek keamanan, kelancaran, dan kejelasan informasi navigasi yang mendukung mobilitas wisatawan beserta keluarganya dengan rasa tenang. Berdasarkan hasil analisis data, indikator aksesibilitas di Pantai Siring Laut menunjukkan pola temuan yang bervariasi, di mana infrastruktur jalan dan petunjuk arah mendapatkan penilaian yang sangat positif, sementara ketersediaan transportasi publik masih menjadi tantangan yang perlu dievaluasi secara mendalam.

Hasil pemetaan *axial coding* memperlihatkan bahwa kelancaran mobilitas wisatawan sangat didukung oleh kondisi jalan menuju pantai yang sudah teraspal dengan baik dan mudah dilalui. Kehadiran papan petunjuk arah yang informatif dan strategis di sepanjang jalur juga memberikan kontribusi signifikan dalam meminimalisir kebingungan atau risiko tersesat, terutama bagi pengunjung yang baru pertama kali datang. Kemudahan akses dan navigasi ini dinilai sangat krusial bagi wisatawan muslim yang mayoritas datang dengan agenda wisata keluarga, karena jalur yang aman akan memberikan ketenangan secara psikologis selama menempuh perjalanan.

Meskipun infrastruktur jalan raya dan sistem navigasi dinilai sudah sangat memadai, temuan di lapangan juga mengungkap adanya kelemahan pada sub-indikator ketersediaan transportasi massal. Para informan menyoroti bahwa armada angkutan umum yang melayani rute langsung menuju kawasan Pantai Siring Laut masih sangat terbatas. Kondisi ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi wisatawan yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pengelola destinasi dan pemerintah daerah. Aksesibilitas angkutan umum yang memadai merupakan syarat penting untuk mewujudkan destinasi wisata ramah muslim yang inklusif dan berstandar global.

Ketersediaan Fasilitas (Amenities) Pendukung Ramah Muslim

Fasilitas (*Amenities*) merupakan inti dari operasionalisasi konsep *Muslim Friendly Tourism* (MFT) di suatu destinasi (Kasmaniar, Mukhdasir, Syamsuddin, Arfan, & Amri, 2023). Dalam kerangka pariwisata halal, penyediaan fasilitas tidak hanya berfokus pada kelengkapan rekreasi semata, tetapi juga wajib mengakomodasi kebutuhan dasar wisatawan muslim dalam menjalankan syariat agamanya selama bepergian (Muslim & Harun, 2022). Berdasarkan pemetaan data, evaluasi wisatawan terhadap aspek *Amenities* di Pantai Siring Laut mencakup tiga dimensi utama: fasilitas ibadah, ekosistem kuliner, serta standar kebersihan lingkungan.

a. Ketersediaan dan Perawatan Fasilitas Ibadah

Infrastruktur ibadah yang memadai adalah syarat mutlak (*necessary condition*) agar sebuah objek wisata dapat dikategorikan sebagai destinasi ramah muslim (Irawan, 2024). Temuan lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual ini telah difasilitasi dengan cukup baik oleh pengelola kawasan Pantai Siring Laut.

Kehadiran mushola di area pantai dinilai sangat membantu pengunjung, khususnya rombongan keluarga, untuk tetap dapat menunaikan ibadah sholat dengan mudah di sela-sela aktivitas rekreasi. Namun, hasil *axial coding* juga mengungkap adanya urgensi terkait pemeliharaan fasilitas tersebut. Para informan menyoroti bahwa peningkatan kualitas

kebersihan dan penambahan sarana pendukung (seperti tempat wudhu atau perlengkapan ibadah) sangat diperlukan agar mushola dapat berfungsi secara maksimal, terutama saat terjadi lonjakan jumlah wisatawan (Weaver & Lawton, 2014).

b. Ekosistem Kuliner Halal dan Informasi Sertifikasi

Dimensi kedua yang sangat krusial dalam *Amenities* pariwisata halal adalah jaminan makanan dan minuman yang dikonsumsi pengunjung (Hakim & Rifa'i, 2024). Pantai Siring Laut memiliki keunggulan pada variasi kuliner pesisir yang melimpah dan aman bagi muslim dengan harga yang terjangkau. Meski ketersediaan makanan halal dinilai sangat baik, sistem jaminan kehalalannya masih bersifat kultural dan belum terlembagakan secara profesional. Wisatawan menyatakan bahwa informasi kehalalan produk umumnya didapat secara lisan langsung dari pedagang lokal. Destinasi ini masih sangat minim informasi halal yang resmi dan belum mengoptimalkan sertifikasi halal dari otoritas terkait (seperti MUI atau BPJPH). Padahal, kehadiran logo atau papan sertifikasi resmi sangat krusial untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*) wisatawan.

c. Kebersihan Lingkungan, Keterbatasan Multibahasa, dan Fasilitas Privasi

Dimensi terakhir dari fasilitas mencakup kenyamanan ruang publik secara keseluruhan. Pengelolaan destinasi yang berwawasan syariah mewajibkan adanya pemeliharaan kebersihan (*thaharah*) di seluruh penjuru kawasan. Secara umum, area utama Pantai Siring Laut terlihat bersih dan rapi, yang mana hal ini memberikan impresi positif bagi wisatawan. Meskipun begitu, terdapat beberapa fasilitas spesifik yang masih absen. Wisatawan menyoroti belum adanya fasilitas privasi khusus (seperti area spesifik untuk perempuan muslim/muslimah) serta keterbatasan papan informasi atau navigasi dalam bahasa asing yang dinilai sangat penting untuk mengakomodasi kunjungan wisatawan internasional di masa depan (Sonjaya, 2024).

d. Dukungan Kelembagaan (*Ancillary*) dan Standarisasi Layanan

Indikator terakhir dalam kerangka kepariwisataan adalah dukungan kelembagaan (*Ancillary*), yang mencakup peran manajemen, regulasi, dan tata kelola destinasi wisata secara keseluruhan (Weaver & Lawton, 2014). Dalam konteks *Muslim Friendly Tourism* (MFT), *Ancillary* memegang peranan vital karena pengembangan pariwisata halal tidak dapat bergantung secara eksklusif pada inisiatif warga lokal, melainkan membutuhkan campur tangan otoritas dan manajemen yang profesional untuk merumuskan standarisasi layanan yang diakui. Berdasarkan pengolahan data melalui Atlas.ti 9, indikator ini menyoroti adanya jarak (*gap*) antara pelayanan kultural masyarakat dengan standar pelayanan formal pariwisata halal.

Dari sisi sumber daya manusia, Pantai Siring Laut sebenarnya telah memiliki modal sosial yang kuat berupa keramahan pelayanan. Wisatawan merasa sangat dihargai karena masyarakat lokal dan staf memberikan pelayanan yang baik, sopan, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan pengunjung.

Axial coding juga mengungkap bahwa keramahan yang bersifat organik ini belum sepenuhnya diarahkan pada standar pelayanan wisata halal yang sistematis. Pengunjung menyadari bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya optimal dalam merepresentasikan konsep *Muslim Friendly Tourism* secara utuh. Kondisi tersebut bermuara pada tingginya kode "Kebutuhan Dukungan Manajemen". Para informan secara gamblang menyuarakan bahwa pihak pengelola dan pemerintah daerah harus segera meningkatkan profesionalitas pengelolaan destinasi. Kebutuhan terhadap penguatan konsep, peningkatan promosi, hingga fasilitasi sertifikasi halal resmi menjadi tuntutan utama dari wisatawan untuk meningkatkan level kepercayaan publik.

Pembahasan

Daya Tarik (Attraction) Pantai Siring Laut dalam Perspektif Muslim Friendly Tourism

Temuan penelitian menunjukkan bahwa daya tarik utama Pantai Siring Laut bertumpu pada rasa aman, kenyamanan lingkungan, dan suasana pesisir yang kondusif bagi keluarga. Hal ini sejalan dengan konsep inti *Muslim Friendly Tourism* (MFT) yang menempatkan keamanan dan kenyamanan sebagai prasyarat emosional yang harus dipenuhi sebelum unsur-unsur lain dapat berfungsi efektif (Pencarelli, 2020). Dalam kerangka GMTI (*Global Muslim Travel Index*), dimensi *Environment* menjadi salah satu dari empat pilar penilaian utama yang secara langsung merefleksikan sejauh mana destinasi mampu menciptakan atmosfer yang aman, bersih, dan kondusif bagi wisatawan Muslim beserta keluarganya (Indahsari & Wulandari, 2023).

Kenyamanan yang dirasakan wisatawan di Pantai Siring Laut bukan semata-mata terjadi secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari upaya pengelolaan kawasan yang konsisten. Pantai ini terletak di jantung kota Kotabaru, berhadapan langsung dengan kantor pemerintahan, sehingga secara inheren memiliki pengawasan yang lebih intensif dibandingkan destinasi terpencil. Kondisi ini memvalidasi temuan Weaver (2014) yang menegaskan bahwa elemen *ancillary* termasuk tata letak kota dan kehadiran institusi formal secara tidak langsung turut membentuk daya tarik sebuah destinasi.

Lebih jauh, daya tarik budaya dan religi juga mulai menguat seiring dengan rencana pembangunan Mesjid Kapal Pesiar di kawasan tersebut. Dalam studi (Sonjaya, 2024) yang mengkaji integrasi kearifan lokal dalam model pariwisata halal di Indonesia, ditekankan bahwa identitas keislaman sebuah destinasi menjadi magnet tersendiri yang mampu memperkuat posisi daya saing secara simbolik. Ketika sebuah pantai memiliki ikon masjid di tepinya, pesan yang disampaikan kepada wisatawan Muslim sangat kuat: bahwa destinasi ini tidak sekadar mengakomodasi kebutuhan ibadah secara teknis, tetapi juga merayakan identitas keislaman sebagai bagian dari karakter kawasan.

Temuan ini juga mengonfirmasi penelitian (Kasmaniar et al., 2023) di Kota Sabang yang membuktikan bahwa daya tarik wisata halal berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Komponen daya tarik yang bersifat emosional rasa aman, nyaman, dan sesuai nilai terbukti menjadi penentu utama kepuasan, bahkan lebih dari sekadar kelengkapan infrastruktur fisik.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, daya tarik yang bersifat aman dan kondusif ini selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Destinasi yang mampu memberikan rasa aman fisik dan psikologis bagi pengunjungnya pada hakikatnya telah melaksanakan misi perlindungan jiwa secara sosial (Ascarya, 2021). Hal ini menegaskan bahwa pengembangan daya tarik wisata halal bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga merupakan amanah sosial yang memiliki dimensi nilai Islami yang mendalam.

Aksesibilitas (Accessibility) Menuju Pantai Siring Laut: Capaian dan Kesenjangan

Aksesibilitas merupakan jembatan antara niat berkunjung dan pengalaman berwisata yang nyata. Tanpa aksesibilitas yang memadai, daya tarik terbaik sekalipun akan kehilangan kapasitasnya untuk menarik wisatawan (Gössling & Scott, 2025). Temuan penelitian menunjukkan gambaran yang ambigu: di satu sisi, kondisi jalan dan navigasi menuju Pantai Siring Laut dinilai sangat baik oleh wisatawan, namun di sisi lain, ketersediaan transportasi umum masih menjadi kendala serius yang berpotensi menghambat inklusivitas destinasi.

Kondisi infrastruktur jalan yang sudah teraspal dengan baik dan papan petunjuk yang informatif di sepanjang jalur memberikan kontribusi positif terhadap pengalaman perjalanan wisatawan. Hal ini sejalan dengan pilar *Access* dalam kerangka *ACES GMTI*, yang mensyaratkan kemudahan konektivitas fisik dan informasi navigasi yang jelas sebagai komponen kesiapan destinasi (Rahim et al., 2024). Pengunjung yang menyatakan bahwa lokasi pantai cukup strategis dan aksesnya sangat lancar (R5.1) mencerminkan terpenuhinya aspek aksesibilitas primer yang menjadi syarat dasar daya saing destinasi.

Namun demikian, keterbatasan transportasi publik yang secara konsisten dikeluhkan wisatawan merupakan isu struktural yang tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif MFT, wisatawan Muslim yang mengutamakan wisata keluarga cenderung membutuhkan opsi mobilitas yang beragam, aman, dan terjangkau. Ketiadaan angkutan umum yang langsung melayani rute menuju kawasan Siring Laut secara implisit menciptakan hambatan bagi segmen wisatawan non-pengguna kendaraan pribadi, termasuk wisatawan dari luar daerah dan mancanegara yang menjadi target pasar GMTI.

Temuan ini bersesuaian dengan penelitian (Hakim & Rifa'i, 2024) di Pantai Kuta NTB yang menyimpulkan bahwa strategi pengembangan pariwisata ramah Muslim membutuhkan penguatan simultan pada dimensi transportasi, bukan hanya fasilitas di dalam kawasan. Aksesibilitas transportasi yang lemah juga akan berdampak langsung pada kemampuan destinasi untuk meningkatkan volume kunjungan secara berkelanjutan, terutama ketika destinasi tengah memasuki fase konsolidasi.

Indikator BPS Kotabaru yang menyebutkan bahwa hanya 14,65% jalan dalam kondisi baik dan lebih dari 67% dalam kondisi rusak di level kabupaten (BPS, 2024) mempertegas bahwa tantangan aksesibilitas melampaui batas kawasan wisata dan merupakan persoalan tata kelola infrastruktur yang lebih sistemik. Kondisi ini sejalan dengan peringatan (Rahmawati, 2023) bahwa implementasi pariwisata halal di Indonesia secara nasional masih terganjal oleh kesenjangan infrastruktur. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas menuju Siring Laut tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh pengelola kawasan semata, tetapi memerlukan komitmen kebijakan yang terintegrasi antara Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Dalam konteks Alquran Surah Al-Baqarah ayat 148 yang menekankan pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan, pengembangan aksesibilitas destinasi wisata halal dapat dimaknai sebagai upaya *fastabiqul khairat* dalam pelayanan publik. Semakin mudah wisatawan khususnya wisatawan Muslim dari berbagai kalangan ekonomi dapat menjangkau destinasi halal, semakin luas manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat setempat secara inklusif.

Fasilitas (Amenities) Pendukung Muslim Friendly Tourism: Antara Potensi dan Kebutuhan Standarisasi

a. Fasilitas Ibadah

Ketersediaan fasilitas ibadah yang layak merupakan necessary condition syarat mutlak yang tidak dapat dikompromikan bagi sebuah destinasi yang mengklaim orientasi ramah Muslim (Jaelani, Ketut, Handayani, & Karjoko, 2020). Temuan lapangan menunjukkan bahwa mushola telah tersedia di kawasan Pantai Siring Laut dan dinilai cukup memadai oleh sebagian besar informan (R2.1). Kehadiran fasilitas ibadah ini merupakan langkah awal yang tepat dan selaras dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang mewajibkan tersedianya sarana ibadah yang layak di setiap destinasi wisata halal.

Meskipun demikian, temuan juga mengungkap bahwa kualitas dan kapasitas mushola yang ada belum sepenuhnya optimal, terutama pada saat lonjakan pengunjung terjadi. Informan menyoroti perlunya peningkatan kebersihan fasilitas wudhu dan penambahan sarana pendukung ibadah (R4.1). Dalam standar GMTI, indikator fasilitas ibadah tidak hanya mengukur ada-tidaknya mushola, tetapi juga kapasitas, kebersihan, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi pengunjung dari berbagai usia dan kondisi fisik.

Kondisi ini paralel dengan temuan Indahsari & Wulandari (2023) yang mengevaluasi destinasi wisata di Bangkalan dan menemukan bahwa aspek kebersihan fasilitas ibadah menjadi salah satu poin yang paling sering dikeluhkan wisatawan Muslim. Implikasinya jelas: peningkatan standar perawatan mushola harus menjadi prioritas pengelola, mengingat fasilitas ibadah adalah cermin pertama yang dilihat wisatawan Muslim dalam menilai seberapa serius sebuah destinasi berkomitmen terhadap identitas kehalalannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 222 mengenai kecintaan Allah terhadap kebersihan, prinsip thaharah bukan sekadar syariat ritual, tetapi juga standar manajemen destinasi yang harus diwujudkan secara konsisten.

b. Ekosistem Kuliner Halal

Jaminan kehalalan makanan merupakan dimensi Amenities yang paling sensitif sekaligus paling krusial bagi wisatawan Muslim (Rachmatie et al., 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pantai Siring Laut memiliki keunggulan komparatif berupa ketersediaan kuliner pesisir yang beragam dengan harga terjangkau, dan secara kultural sangat aman dikonsumsi oleh wisatawan Muslim karena mayoritas pedagang adalah muslim lokal. Wisatawan umumnya mendapatkan konfirmasi kehalalan secara lisan langsung dari pedagang (R1.1), yang merupakan mekanisme jaminan informal yang berfungsi cukup efektif dalam konteks komunitas Muslim homogen.

Namun, mekanisme jaminan halal yang bersifat lisan dan informal ini memiliki keterbatasan fundamental ketika destinasi berambisi menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas termasuk wisatawan dari luar daerah, mancanegara, atau mereka yang memiliki standar verifikasi halal yang lebih tinggi. Dalam laporan Kemenparekraf terkait pariwisata ramah Muslim, sertifikasi halal resmi dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) atau MUI disebut sebagai komponen yang harus ada (*must have*) dalam ekosistem layanan destinasi halal yang kompetitif.

Hal ini diperkuat oleh temuan Sinulingga et al. (2018) yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di kawasan wisata maritim. Pemerintah perlu mengambil langkah proaktif dengan memfasilitasi program sertifikasi halal massal bagi pedagang di Siring Laut, mengalokasikan anggaran untuk pemasangan papan informasi halal yang resmi, serta membangun sistem monitoring kehalalan yang berkelanjutan. Investasi regulasi ini bukan hanya soal standar administratif, tetapi merupakan strategi peningkatan kepercayaan pasar yang akan berdampak langsung pada pertumbuhan kunjungan jangka panjang.

c. Kebersihan dan Privasi Lingkungan

Standar kebersihan lingkungan (*thaharah*) dan ketersediaan fasilitas privasi merupakan dua aspek amenities yang secara spesifik membedakan destinasi wisata halal dari destinasi wisata konvensional (Muslim & Harun, 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa area utama Pantai Siring Laut secara umum bersih dan rapi, yang memberikan kesan awal yang positif bagi wisatawan. Namun, dua kekurangan spesifik teridentifikasi: pertama, belum tersedianya fasilitas privasi khusus bagi muslimah; dan kedua, minimnya papan informasi berbahasa asing yang dibutuhkan untuk menyambut wisatawan internasional (R4.1 dan R5.1).

Ketiadaan area khusus untuk muslimah misalnya area istirahat tertutup atau fasilitas ganti yang terlindungi mencerminkan belum terintegrasinya perspektif gender dalam desain fasilitas destinasi. Purnama et al. (Purnama, Hidayanti, & Safitri, 2024) dalam kajiannya mengenai wisata halal di Banten menemukan temuan serupa: bahwa isu privasi perempuan Muslim kerap menjadi blind spot dalam perencanaan destinasi yang didominasi perspektif teknis. Padahal, dalam konteks wisata keluarga Muslim, kenyamanan anggota keluarga perempuan seringkali menjadi penentu utama keputusan untuk kembali berkunjung atau merekomendasikan destinasi kepada orang lain.

Minimnya papan informasi multibahasa juga menjadi perhatian serius dari perspektif GMTI, khususnya pada pilar *Communication*. Destinasi yang tidak menyediakan informasi layanan dalam bahasa internasional (minimal Inggris dan Arab) akan menghadapi hambatan signifikan dalam menarik kunjungan wisatawan Muslim dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan yang merupakan segmen pasar global dengan daya beli tinggi. Mengacu pada proyeksi GMTI 2025 yang menunjukkan pertumbuhan kedatangan wisatawan Muslim global secara konsisten, kesiapan komunikasi multibahasa merupakan investasi jangka panjang yang tidak dapat ditunda (Rahim et al., 2024).

Dukungan Kelembagaan (Ancillary): Dari Keramahan Kultural Menuju Profesionalisme Terstandar

Pilar *Ancillary* dalam kerangka 4A merupakan unsur yang paling sering diabaikan dalam diskusi pengembangan destinasi, padahal justru menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan seluruh elemen lainnya (Weaver & Lawton, 2014). Temuan penelitian mengungkap kontradiksi yang menarik di Pantai Siring Laut: modal sosial keramahan masyarakat lokal sangat kuat dan diapresiasi tinggi oleh wisatawan, namun dukungan kelembagaan formal masih jauh dari memadai untuk mendukung standardisasi layanan MFT.

Keramahan pelayanan yang bersifat organik dari masyarakat lokal (R3.1) merupakan aset destinasi yang tak ternilai. Dalam literatur pariwisata, kondisi ini dikenal sebagai *hospitality capital* bentuk modal sosial yang lahir dari nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat setempat. Bagi komunitas Muslim di Kotabaru yang menjunjung tinggi nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dalam melayani tamu, keramahan ini merupakan manifestasi nilai-nilai syariah yang hidup dalam praktik keseharian.

Namun, keramahan kultural yang tidak didukung oleh standar pelayanan yang terdokumentasi dan terlatih akan rentan terhadap inkonsistensi. Wisatawan yang datang dengan ekspektasi tinggi berdasarkan reputasi destinasi halal dapat mengalami kekecewaan jika kualitas layanan yang diterima bervariasi secara signifikan antar pelaku usaha. Kondisi ini dipertegas oleh pernyataan informan yang menyatakan perlunya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan (R4.1) dan pentingnya pengelolaan yang lebih profesional (R3.1). Kedua pernyataan ini secara implisit mengindikasikan bahwa wisatawan sendiri sudah merasakan adanya gap antara potensi yang dimiliki dan standar layanan yang diberikan.

Irawan et al. (2024) dalam kajian pariwisata ramah agama menyatakan bahwa sertifikasi dan standarisasi layanan merupakan alat legitimasi yang paling efektif untuk mengangkat citra destinasi halal dari level lokal ke level nasional dan internasional. Tanpa proses standarisasi ini, destinasi akan menghadapi kesulitan dalam bersaing pada pemeringkatan GMTI yang menggunakan indikator terukur dan terverifikasi. Hal ini juga selaras dengan kritik Ronald Rulindo (2024) yang menyatakan bahwa aspek *Muslim-friendly tourism* belum benar-benar terintegrasi dalam pengelolaan destinasi secara praktis di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kotabaru.

Dimensi promosi dan pemasaran digital juga menjadi bagian penting dari *Ancillary* yang belum optimal di Siring Laut. Dalam era digital, pilar Communication dalam GMTI sangat menekankan pentingnya kehadiran destinasi dalam platform digital, kemudahan booking secara daring, serta penyebaran informasi halal yang akurat melalui media sosial. Pernyataan informan yang menyoroti perlunya peningkatan promosi dan penguatan konsep wisata halal (R5.1) mencerminkan kesadaran wisatawan bahwa potensi Siring Laut belum dikomunikasikan secara optimal kepada pasar yang lebih luas.

Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru sebenarnya telah menyediakan landasan hukum yang cukup untuk mendorong pengembangan destinasi secara terstruktur. Namun sebagaimana diidentifikasi oleh Cahaya Purnama et al. (2024), implementasi kebijakan pariwisata halal di lapangan seringkali mengalami fragmentasi akibat kurangnya koordinasi lintas dinas, minimnya anggaran khusus, dan belum adanya roadmap halal tourism yang spesifik dan terukur. Pemerintah Kotabaru perlu mengisi kekosongan ini dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus wisata halal, membentuk tim sertifikasi dan monitoring, serta mengalokasikan anggaran promosi yang ditujukan secara khusus untuk pasar wisatawan Muslim domestik dan internasional.

Sintesis: Posisi Pantai Siring Laut dalam Perspektif Global Muslim Friendly Tourism

Berdasarkan analisis keempat dimensi 4A yang telah dipaparkan, penelitian ini menghasilkan pemetaan posisi Pantai Siring Laut dalam perspektif *Global Muslim Friendly Tourism*. Secara keseluruhan, destinasi ini berada pada fase transisi: dari destinasi wisata populer berbasis kenyamanan kultural, menuju destinasi wisata halal yang terstandar dan berkapasitas kompetitif di tingkat nasional bahkan global.

Merujuk pada kerangka ACES GMTI *Access, Communication, Environment*, dan *Services* Pantai Siring Laut menunjukkan kekuatan pada dimensi *Environment* (keamanan, kenyamanan, kebersihan umum) dan kekuatan relatif pada dimensi *Access* (infrastruktur jalan). Sementara itu, kelemahan paling signifikan teridentifikasi pada dimensi *Services* (ketiadaan sertifikasi halal resmi, belum adanya SOP pelayanan MFT, dan absennya fasilitas privasi) dan *Communication* (minimnya informasi digital, papan informasi multibahasa, dan promosi berbasis MFT).

Kondisi ini sejalan dengan temuan makro (Rahmawati, 2023) yang menyimpulkan bahwa destinasi wisata halal di Indonesia secara umum telah lebih maju dalam pemenuhan aspek infrastruktur fisik dibandingkan aspek layanan terstandar dan komunikasi. Artinya, tantangan utama bukan lagi membangun fasilitas dari nol, melainkan meningkatkan kualitas dan standarisasi layanan yang sudah ada sebuah transisi yang jauh lebih kompleks karena melibatkan perubahan perilaku, budaya organisasi, dan kapasitas sumber daya manusia.

Purnama et al. (2024) menegaskan bahwa potensi dan tantangan pengembangan wisata halal di suatu destinasi sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat komitmen kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga agama. Di Siring Laut, modal awal untuk kolaborasi ini sudah ada: pemerintah daerah menunjukkan komitmen investasi infrastruktur yang besar, masyarakat lokal memiliki modal keramahan dan nilai keislaman yang kuat, dan wisatawan datang dengan persepsi positif. Yang dibutuhkan adalah orkestrator yang mampu mengkonversi modal-modal tersebut menjadi sistem pelayanan MFT yang terstandar, konsisten, dan berkelanjutan.

Dalam tinjauan maqashid syariah, pengembangan wisata halal yang komprehensif di Siring Laut dapat dipahami sebagai upaya holistik untuk melindungi lima kemashlahatan pokok: *hifz al-din* (perlindungan agama) melalui fasilitas ibadah dan jaminan halal; *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui keamanan dan kesehatan lingkungan; *hifz al-aql* (perlindungan akal) melalui edukasi wisata yang berkualitas; *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui layanan ramah keluarga dan fasilitas privasi; dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) melalui ekosistem ekonomi lokal yang adil dan berdampak bagi masyarakat sekitar (Ascarya, 2021). Kelima dimensi ini menjadikan pengembangan wisata halal di Siring Laut bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi sebuah misi peradaban yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pantai Siring Laut memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk berkembang menjadi destinasi *Muslim Friendly Tourism* yang kompetitif. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan akselerasi terstandar pada dimensi layanan dan komunikasi, seraya mempertahankan keunggulan komparatif yang sudah dimiliki pada dimensi lingkungan dan akses infrastruktur. Sebagaimana bunyi Hadits Riwayat Ibn Majah bahwa tidak ada kerugian dan tidak boleh ada kemudharatan (*la dharara wa la dhirar*), pembangunan destinasi wisata halal yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa setiap langkah pengembangan membawa manfaat baik bagi wisatawan yang berkunjung, masyarakat lokal yang menggantungkan penghidupan, maupun bagi kelestarian lingkungan pesisir yang menjadi sumber daya tak tergantikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pantai Siring Laut memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata halal yang kompetitif dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis menggunakan konsep 4A (*Attraction, Accessibility, Amenities, dan Ancillary*), aspek attraction menunjukkan bahwa Pantai Siring Laut memiliki daya tarik yang kuat melalui keindahan pantai, suasana yang nyaman, serta lingkungan yang sesuai untuk wisata keluarga. Pada aspek *accessibility*, Pantai Siring Laut memiliki akses jalan yang relatif baik dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pada aspek amenities, tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti mushola, toilet, area kuliner, tempat duduk, dan sarana umum lainnya yang mendukung kenyamanan wisatawan. Pada aspek *ancillary*, masyarakat sekitar menunjukkan sikap yang ramah dan mendukung aktivitas pariwisata. Secara keseluruhan, Pantai Siring Laut telah memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang sebagai destinasi wisata halal. Namun, diperlukan peningkatan kualitas layanan, penguatan kelembagaan, pengembangan promosi, serta sertifikasi halal yang lebih luas agar destinasi ini mampu memenuhi standar *Global Muslim Friendly Tourism* dan menjadi salah satu destinasi wisata halal unggulan di Kalimantan Selatan maupun Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdiska, D., & Kamarni, N. (2024). The Influence Of Muslim Friendly Tourism On The Satisfaction Of Tourists Visiting The Tourist Attraction Of Air Manis Beach In Padang City-Debi Abdiska et.al The Influence Of Muslim Friendly Tourism On The Satisfaction Of Tourists Visiting The Tourist Att. *Jurnal Ekonomi*, 13. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i03>

- Adinugraha, H. H., Al-Kasyaf, M. Z., & Nasaruddin, R. Bin. (2025). Applying Muslim-friendly tourism principles in destination management: Evidence from Aceh, Indonesia Article Info. *International Journal of Halal Industry*, 1, 68–83. <https://doi.org/10.20885/IJHI.v>
- Ascarya. (2021). Does Islamic Microfinance Serve Maqasid al-Shari'a? *Borsa Istanbul Review*, 21(1).
- Fahira, K., Qodhari, D., & Azhar, J. A. (2025). The Impact of Halal Destination Attributes, Experience Quality, and Local Behaviour on Muslim Tourist Satisfaction in Lombok: Moderation Destination Image. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 9(1), 13–26. <https://doi.org/10.18196/jerss.v9i1.24438>
- Fradesa, F. (2022). The Potential of Sharia Tourism Muara Jambi Temple on Regional Economic Growth. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 53–68. <https://doi.org/10.21927/jesi>
- Gössling, S., & Scott, D. (2025). Climate change and tourism geographies. *Tourism Geographies*, 27(3–4), 642–652. <https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2332359>
- Hakim, A. L., & Rifa'i, M. N. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA RAMAH MUSLIM DI PANTAI KUTA, NUSA TENGGARA BARAT. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 11(2), 116. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v11i2.52145>
- Indahsari, K., & Wulandari, R. D. (2023). Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Pada Destinasi Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 45–65. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i1.631>
- Irawan, J. A. (2024). *Standarisasi Layanan Pariwisata Ramah Agama*.
- Jaelani, A. K., Ketut, G. A., Handayani, R., & Karjoko, L. (2020). Development of Halal Tourism Destinations in the Era of Regional Autonomy in West Nusa Tenggara Province. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(12). Retrieved from www.ijicc.net
- Kasmaniar, Mukhdasir, Syamsuddin, N., Arfan, F., & Amri, S. (2023). Pengaruh Daya Tarik Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Sabang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(4), 1511–1515.
- McKercher, B., & Wong, I. A. (2021). Do destinations have multiple lifecycles? *Tourism Management*, 83, 104232. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104232>
- Muslim, A. K., & Harun, A. (2022). Exploring the Concept of Muslim Friendly Tourism. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 10(3), 55–89. <https://doi.org/10.21427/n4fm-gb33>
- Nasrulloh, N., Adiba, E. M., & Efendi, M. N. (2023). Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Pesisir Bangkalan Madura: Identifikasi Peranan Bank Syariah. *Muslim Heritage*, 8(1), 79–102. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i1.4989>
- Pencarelli, T. (2020). The digital revolution in the travel and tourism industry. *Information Technology & Tourism*, 22(3), 455–476. <https://doi.org/10.1007/s40558-019-00160-3>
- Pramana, A., & Zamaya, Y. (2021). The Potential Identification of Pulau Belimbing Village for the Development of Halal Tourism in Kampar Regency. *Jurnal Dakwah Risalah*, 32(1), 96. <https://doi.org/10.24014/jdr.v32i1.12704>

- Purnama, L. C., Hidayanti, D., & Safitri, M. A. (2024). Pembangunan Wilayah Berbasis Potensi Wisata Halal di Banten. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 3(2), 113–125. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i2.578>
- Rachmiate, A., Setiawan, F., Yuningsih, A., & Suja'i, I. S. (2023). Halal Tourism Village Potential Through Asset Based Community Development. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 133–143. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.11068>
- Rahim, A. R., M, E., Haliding, S., Syafiuddin, S., Hakim, L., & Wahyuddin, W. (2024). The Development of Muslim-Friendly Tourism (Halal Tourism) in Boosting Economic Potential in Indonesia: A Comparative Study of Singapore and the United Kingdom. *Journal of Management World*, 2024(4), 562–569. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.461>
- Rahmawati, R. (2023). Halal Tripnesian: Aplikasi Muslim Friendly Tourism Sebagai Solusi Kemudahan Akses Pariwisata Halal Setelah Covid-19 di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*.
- Rulindo, R. (2024). Crossmark Policy. *Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.20885/JEKI>
- Sinulingga, A. A., Asri, S., & Trisni, S. (2018). *The Thought Of Developing*.
- Sonjaya, A. (2024). *The Collaboration of Penta Helix to Develop Halal Tourism Villages in Batang, Central Java*.
- Verkerk, V.-A. (2022). Virtual Reality: A Simple Substitute or New Niche? In *Information and Communication Technologies in Tourism 2022* (pp. 28–40). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94751-4_3
- Weaver, D., & Lawton, L. (2014). *Tourism Management*. John Wiley & Sons.
- Yunadi, A., Ifsantin Maula, D., Al Adhawiyah, T. S. N. I., & Nikmatul Ula, V. (2024). The Influence of Muslim-Friendly Tourism on Foreign Tourist Visits. *ASEAN Article Info*. <https://doi.org/10.33830/elqish.v1i1.6779.2024>